



DOKUMEN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

TAHUN
ANGGARAN 2026

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja secara periodik pada tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi TA 2026. Laporan ini disusun dengan melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran atas capaian terhadap sasaran dan target kinerja untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Triwulanan. Selain itu, Laporan ini berisi realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan kemudian dibandingkan dengan target tiap triwulannya.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 yang disahkan pada bulan Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membantu Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dalam melaksanakan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV seperti tercantum pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan paket pekerjaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur akan dilakukan pemantauan secara berkala tiap triwulan dengan dokumen rencana aksi sebagai dasarnya. Laporan Kinerja Triwulan I Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur ini merupakan alat pemantauan dan evaluasi pencapaian target dalam bentuk laporan pengukuran kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulanan ini diharapkan permasalahan dan kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dapat diantisipasi pada bulan berikutnya.

Surabaya, April 2026
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Timur



Shinta Dewi Astari S.T., M.T.
NIP. 198212072006042021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	6
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II CAPAIAN KINERJA	9
2.1. TARGET KINERJA TRIWULAN I	9
A. TARGET KINERJA FISIK TRIWULAN I	9
B. TARGET KINERJA KEUANGAN TRIWULAN I	11
2.2. CAPAIAN TARGET TRIWULAN I	11
A. CAPAIAN TARGET FISIK TRIWULAN I	11
B. CAPAIAN TARGET KEUANGAN TRIWULAN I	13
C. PERUBAHAN TARGET DAN REVISI DIPA PADA TRIWULAN I	13
2.3. PERMASALAHAN ATAU FAKTOR KEBERHASILAN	17
BAB III PENUTUP.....	18
3.1. RENCANA TINDAK LANJUT	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Triwulan I TA. 2026	9
Tabel 2. Target Keuangan Triwulan I TA. 2026.....	11
Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan I TA. 2026	12
Tabel 4. Capaian Keuangan Triwulan I TA 2026.....	13
Tabel 5. Daftar Revisi DIPA dan Perubahan Output	14
Tabel 6. Daftar Perubahan Target Keuangan.....	16
Tabel 7. Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan I.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap instansi dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui capaian kinerja yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan salah satu penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulanan pada hakekatnya memuat ringkasan pencapaian kinerja dalam kurun waktu 3 bulan. Laporan kinerja triwulanan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi. Penyusunan laporan triwulan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur disusun guna mendukung Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan merupakan penjabaran pencapaian target secara periodik atas sasaran dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Rencana Aksi yang menjadi acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala (triwulan) dalam 1 (satu) tahun masa anggaran.

Target kinerja dan capaian target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Laporan Kinerja Triwulanan ini merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa Unit Organisasi antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Laporan Kinerja Triwulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur ini merupakan alat pemantauan dan evaluasi pencapaian target dalam bentuk laporan pengukuran kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulanan ini diharapkan permasalahan dan kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dapat diantisipasi pada bulan berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan yang diturunkan dari tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Jawa Timur”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
2. Tujuan kedua yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur” dengan indikator kemajuan dalam kualitas layanan manajemen organisasi, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan tercapainya indikator ini, diharapkan kinerja balai semakin kredibel dan pelaksanaan tugas serta fungsi dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur menjabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui serangkaian program dan kegiatan. Mengacu pada sasaran strategis Unit Organisasi dan Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hunian Layak, yaitu melalui kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni;
2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh; dan
3. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Program (SP) tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan selama periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 Meningkatnya Hunian Layak, yaitu melalui kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Jawa IV;
 - Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
2. Sasaran Program 2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3. Sasaran Program 3 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dengan Sasaran Kegiatan:
 - Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satker PKP Provinsi Jawa Timur

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai dampak dari lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Selanjutnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35/KPTS/M/2025 yang disahkan pada bulan Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur membantu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dalam melaksanakan Pembangunan Perumahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV seperti tercantum pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TUGAS

Mengacu pada tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Unit Pelaksana Tugas (UPT) yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

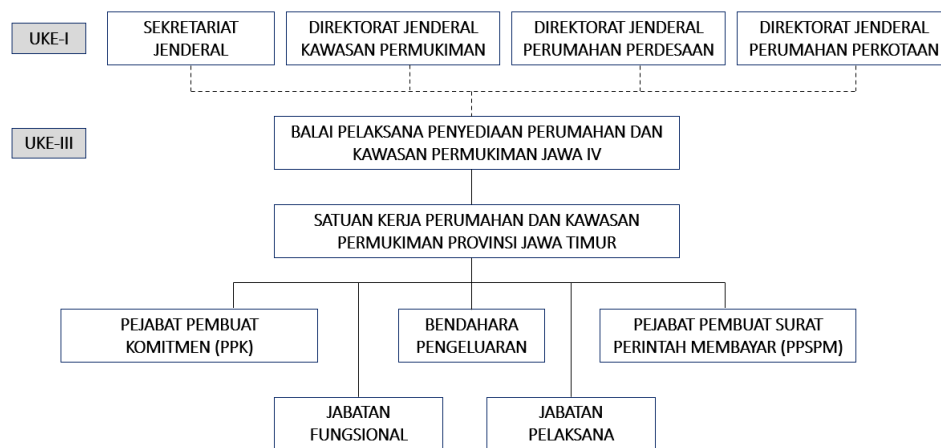
Dari beberapa penyelenggaraan fungsi diatas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur berfokus melaksanakan fungsi nomor c,d, dan e.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam membantu tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV khususnya dalam hal pelaksanaan Pembangunan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman serta penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial di Provinsi Jawa Timur, maka dibentuklah Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV dan mengampu kegiatan dari 4 (empat) Unit

Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat tenaga penunjang utama dalam susunan organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Kepala Satuan Kerja, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seluruh jajaran dalam susunan organisasi pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan guna memastikan penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan secara efisien, efektif, dan optimal.



Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Jawa Timur

BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1. TARGET KINERJA TRIWULAN I

A. TARGET KINERJA FISIK TRIWULAN I

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penetapan kinerja adalah komitmen formal antara pimpinan dan pelaksana untuk mencapai target tertentu dalam satu tahun anggaran, dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penetapan Kinerja dalam adalah proses menetapkan target kinerja yang spesifik, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi, kemudian menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah operasional yang lebih detail agar dapat dilaksanakan oleh unit kerja.

Target Kinerja Triwulan I ini mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dan tercantum dalam Dokumen Rencana Aksi.

Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa Unit Organisasi antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 1. Target Kinerja Triwulan I TA. 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN TRIWULAN I
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal		
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	1 layanan
2	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan
3	Jumlah layanan sarana internal	1 unit	1 layanan
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukima		
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	1 layanan

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET PK AWAL	TARGET CAPAIAN TRIWULAN I
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Perdesaan		
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	320 Unit	0 unit
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan	0 laporan
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	1 layanan
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan	0 laporan
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan

B. TARGET KINERJA KEUANGAN TRIWULAN I

Selain itu terdapat pula Target Keuangan Triwulan yang merupakan penggabungan target keuangan 3 bulan yang diambil dari Halaman 3 DIPA Awal masing-masing Unit Organisasi. Target Keuangan Triwulan I mencakup target keuangan dari Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2. Target Keuangan Triwulan I TA. 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET KEU (PK AWAL)	TARGET KEU (TRIWULAN I)
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
NOMOR	DIPA- 146.01.1.691403/2026		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp 830.402.000	Rp 174.673.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.03.1.691457/2026		
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 46.354.000	Rp 4.160.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.04.1.691511/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp 11.288.865.000	Rp 2.822.214.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.05.1.691565/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp 30.173.000	Rp 1.411.000

2.2. CAPAIAN TARGET TRIWULAN I

A. CAPAIAN TARGET FISIK TRIWULAN I

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur memiliki target sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 dan Dokumen Rencana Aksi TA 2026 dengan target capaian kinerja tiap triwulan. Evaluasi capaian kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui besaran capaian yang berhasil direalisasikan. Besaran capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah yang dapat direalisasikan dibagi dengan jumlah yang direncanakan baik fisik maupun keuangan.

Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan I TA. 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET CAPAIAN TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	PROSENTASE CAPAIAN TRIWULAN I	KETERANGAN
UO	SEKRETARIAT JENDERAL				
P	DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal				
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	100%	-
2	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%	
3	Jumlah layanan sarana internal	1 unit	1 layanan	100%	
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukima				
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	100%	-
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Perdesaan				
1	Jumlah unit Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	320 Unit	0 unit	0,00%	-
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 laporan	0 laporan	0,00%	-
P	DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	100%	-
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN				
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SK	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN I	CAPAIAN TRIWULAN I	PROSENTASE CAPAIAN TRIWULAN I	KETERANGAN
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan	0 laporan	0,00%
P	DUKUNGAN MANAJEMEN			
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%

B. CAPAIAN TARGET KEUANGAN TRIWULAN I

Capaian keuangan tiap triwulan berdasarkan data realisasi pada Dokumen FA Detail masing-masing DIPA dan berdasarkan pada aplikasi myPKP (<https://my.pkp.go.id/>).

Tabel 4. Capaian Keuangan Triwulan I TA 2026

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	TARGET KEU (TRIWULAN I)	CAPAIAN KEU (TRIWULAN I)	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
NOMOR	DIPA- 146.01.1.691403/2026		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp 174.673.000	Rp 198.175.597
			113,46%
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.03.1.691457/2026		
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 4.160.000	Rp 331.397.180
			7966,28%
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.04.1.691511/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp 2.822.214.000	Rp 1.342.027.532
			47,55%
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.05.1.691565/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp 1.411.000	Rp 179.400.000
			12714,39%

C. PERUBAHAN TARGET DAN REVISI DIPA PADA TRIWULAN I

Selama periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2026 terdapat beberapa revisi DIPA dan perubahan target output. Rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5. Daftar Revisi DIPA dan Perubahan Output

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 830.402.000,00	Perihal : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) List Rincian Output: - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 *output tetap, pagu berubah
2	DIPA Revisi 2 Tanggal 19 Februari 2026	Rp 830.402.000,00	Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III DIPA List Rincian Output : - 7665.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp11.853.000 - 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran : 1 Layanan, Rp707.615.000 - 7665.EBB.951 Layanan Sarana Internal : 1 Unit, Rp.110.934.000 *output tetap, pagu berubah
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 46.354.000	Perihal Revisi : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) List Rincian Output : - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 46.354.000 *output tetap, pagu berubah
2	DIPA Revisi 2 Tanggal 18 Februari 2026	Rp 58.507.224.000	Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) List Rincian Output : - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 48.000.000.000,00 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 46.354.000,00 *output berubah, pagu berubah
3	DIPA Revisi 3 Tanggal 20 Februari 2026	Rp 58.553.578.000	Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III List Rincian Output : - 7659.RBB.008 Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman : 2400 Unit, Rp. 58.507.224.000,00 - 7674.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 46.354.000,00 *output tetap, pagu berubah

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 11.288.865.000	Perihal Revisi : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) List Rincian Output : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, Rp. 20.613.000 - 7660.RBB.005 Komponen Rumah untuk Mitigasi Bencana: 320 Unit, Rp. 11.250.000.000 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000 <i>*output tetap, pagu berubah</i>
2	DIPA Revisi 2 Tanggal 13 Februari 2026	Rp 137.769.878.000	Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) List Rincian Output : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, Rp. 100.004.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 137.651.622.000,00 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000 <i>*output berubah, pagu berubah</i>
3	DIPA Revisi 3 Tanggal 19 Februari 2026	Rp 137.769.878.000	Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III List Rincian Output : - 7660.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, Rp. 100.004.000 - 7660.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan : 6300 Unit, Rp. 137.651.622.000,00 - 7675.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 18.252.000 <i>*output tetap, pagu berubah</i>
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
1	DIPA Revisi 1 Tanggal 29 Desember 2025	Rp 30.173.000	Perihal Revisi : Revisi DJA (Pengurangan Anggaran) List Rincian Output : - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan: 1 Layanan, Rp. 18,716,000 - 7676.EBA.962 Layanan Umum: 1 Layanan, Rp.11,457,000 <i>*output tetap, pagu berubah</i>
2	DIPA Revisi 2 Tanggal 13 Februari 2026	Rp 59.241.899.000	Perihal Revisi : Revisi DJA (Penambahan Anggaran) List Rincian Output : - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 28.716.000,00 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 2700 Unit, Rp. 59.200.726.000,00

No.	Perubahan DIPA	Pagu Anggaran	Keterangan
			- 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 <i>*output berubah, pagu berubah</i>
3	DIPA Revisi 3 Tanggal 19 Februari 2026	Rp 59.241.899.000	Perihal Revisi : Pemutakhiran Halaman III List Rincian Output : - 7661.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan : 1 Laporan, Rp. 28.716.000,00 - 7661.RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perkotaan : 2700 Unit, Rp. 59.200.726.000,00 - 7676.EBA.962 Layanan Umum : 1 Layanan, Rp. 12.457.000,00 <i>*output tetap, pagu tetap</i>

Tabel 6. Daftar Perubahan Target Keuangan

UNIT ORGANISASI/PROGRAM/SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN		TARGET KEU (PK AWAL)	TARGET KEU BERDASARKAN REVISI DIPA PADA AKHIR TW I
UO	SEKRETARIAT JENDERAL		
P	DUKUNGAN MANAJEMEN		
NOMOR	DIPA- 146.01.1.691403/2026		
1	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp 830.402.000	Rp 830.402.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.03.1.691457/2026		
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 46.354.000	Rp 58.553.578.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.04.1.691511/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp 11.288.865.000	Rp 137.769.878.000
UO	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
P	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
NOMOR	DIPA- 146.05.1.691565/2026		
1	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp 30.173.000	Rp 59.241.899.000

2.3. PERMASALAHAN ATAU FAKTOR KEBERHASILAN

Beberapa permasalahan dalam pencapaian target kinerja dan keuangan pada Triwulan I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan I

UNIT ORGANISASI	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN TW I	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
SEKRETARIAT JENDERAL			
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	113,46%	Prosentase capaian lebih dari 100% dikarenakan terdapat perubahan anggaran (Revisi DIPA) seperti tercantum pada Tabel 6 Daftar Perubahan Target Keuangan	Telah dilakukan penyesuaian rencana realisasi pada Halaman 3 DIPA Sekjen
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	7966,28%	Prosentase capaian lebih dari 100% dikarenakan terdapat perubahan anggaran (Revisi DIPA) seperti tercantum pada Tabel 6 Daftar Perubahan Target Keuangan	Telah dilakukan penyesuaian rencana realisasi pada Halaman 3 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	47,55%	Prosentase capaian lebih dari 100% dikarenakan terdapat perubahan anggaran (Revisi DIPA) seperti tercantum pada Tabel 6 Daftar Perubahan Target Keuangan	Telah dilakukan penyesuaian rencana realisasi pada Halaman 3 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	12714,39%	Prosentase capaian lebih dari 100% dikarenakan terdapat perubahan anggaran (Revisi DIPA) seperti tercantum pada Tabel 6 Daftar Perubahan Target Keuangan	Telah dilakukan penyesuaian rencana realisasi pada Halaman 3 DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

BAB III

PENUTUP

3.1. RENCANA TINDAK LANJUT

Pada Triwulan I Tahun 2026, rata-rata kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur sudah terdapat realisasi namun tidak dapat dilakukan pengukuran secara konkrit karena terdapat perubahan target keuangan seiring dengan perubahan Revisi DIPA.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN I (JANUARI – MARET 2026)

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I TA 2026



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Madiun oleh Tim Balai dan Satker



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Survei Lahan bersama Tim Survei dari Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian di Kota Surabaya



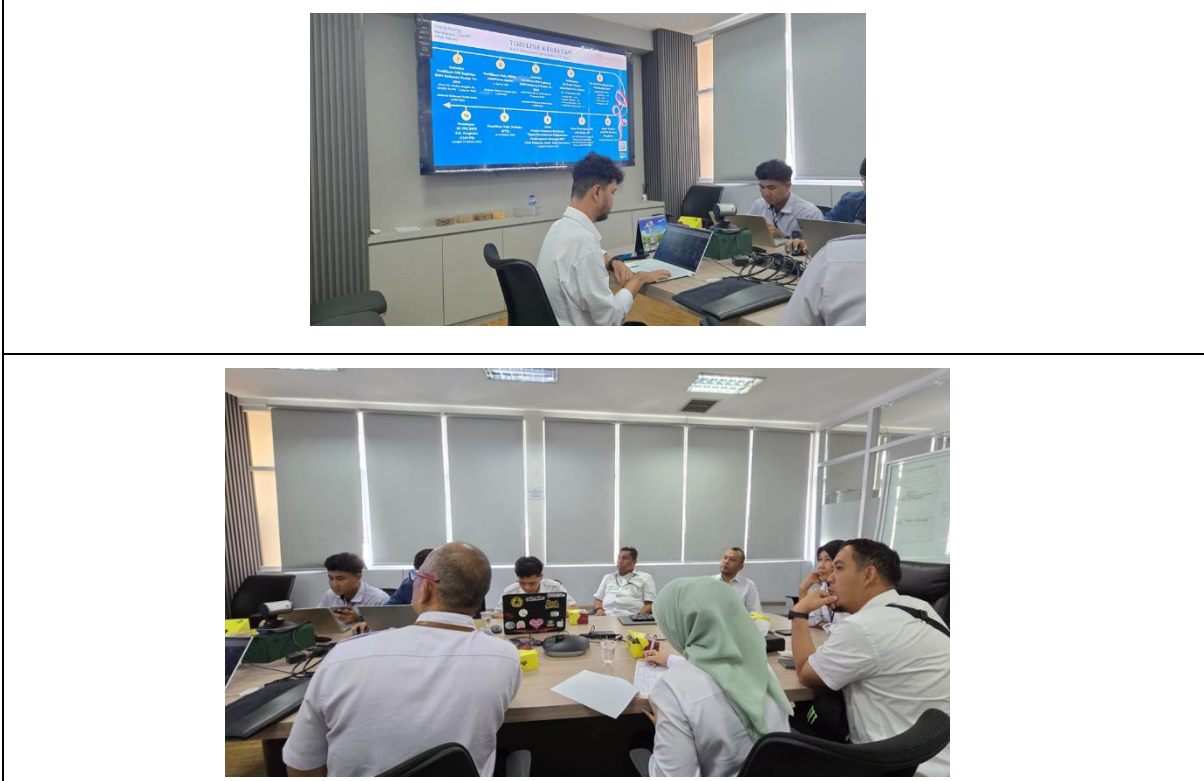
Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Kab. Sidoarjo



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan Lapangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Rumah Susun Pondok Pesantren Miftahul Ulum



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Rumah Susun Yayasan Bina Patria Nusantara Universitas Tribuwana Tungadewi Malang



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan BPS TA 2025 di Kantor Kementerian PKP Jakarta dan Mengikuti Acara Forum Integritas Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Dokumentasi Pelaksanaan Penandatanganan Kerjasama dengan Bank Penyalur Kegiatan BPS TA 2026



Dokumentasi Pelaksanaan Pembekalan Tenaga Fasilitas BPS



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota terkait Pelaksanaan Kegiatan BPS



SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TIMUR